

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Stewardship

Menurut Donaldson & Davis (1991), teori Stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, selain itu perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya sebab steward berusaha mencapai sasaran organisasinya. Teori ini didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan atau organisasi sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada prinsipalnya.

Teori stewardship ini mengharapkan individu yang berada didalam perusahaan maupun suatu organisasi lebih menjunjung tujuan perusahaan dibandingkan dengan tujuan perorangan. Teori ini lebih cocok digunakan pada instansi pemerintah yang dimana tidak berorientasi pada laba namun lebih condong kepada pelayanan yang baik untuk masyarakat sebagai prinsipalnya, sehingga sudah sewajarnya instansi memberikan pelayanan yang baik dikarenakan sumber daya yang diperoleh untuk menjalankan kegiatan operasional berasal dari masyarakat.

Motivasi individu untuk melakukan suatu tindakan pada suatu instansi maupun perusahaan digambarkan secara jelas dalam teori ini yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada prinsipal. Penanaman nilai yang terkandung dalam teori ini akan memberikan dampak yang baik dalam menjalankan pemerintahan yang sehat.

2. Teori Penetapan Tujuan (*Goal Setting Theory*)

Teori penetapan tujuan merupakan salah satu bagian dari teori motivasi, teori ini memaparkan bahwa tindak tanduk individu dikendalikan oleh ide (pemikiran) dan niat yang ada dalam diri individu tersebut (Locke dan Latham, 1990). Individu bertindak berdasarkan tujuan yang ingin dicapainya dalam melakukan suatu kegiatan atau tindakan, semakin kuat keinginannya untuk mencapai tujuan maka semakin termotivasi untuk terus bergerak.

Goal setting theory menjelaskan hubungan antara tujuan yang ditetapkan dengan prestasi kerja (kinerja). Konsep dasar teori ini adalah seseorang yang memahami tujuan (apa yang diharapkan organisasi kepadanya) akan mempengaruhi perilaku kerjanya. Sasaran dapat dipandang sebagai tujuan atau tingkat kerja yang ingin dicapai oleh individu. Jika seorang individu berkomitmen untuk mencapai tujuannya, maka hal ini akan memengaruhi tindakan dan konsekuensi kerjanya. Teori ini juga menjelaskan bahwa penetapan tujuan yang menantang (sulit) dan dapat diukur hasilnya akan dapat meningkatkan prestasi kerja

(kinerja), yang diikuti dengan kemampuan dan ketrampilan kerja (Srimindarti, 2012).

3. Teori Agensi

Teori agensi merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara agen dan prinsipal dalam hal mengelola sumber daya yang diberikan oleh prinsipal. Teori ini menjelaskan bagaimana agen harus memberikan yang terbaik dalam mengelola sumber daya yang diberikan oleh principal dan bekerja sesuai dengan keinginan pemegang saham (Anthony dan Govindarajan, 2005).

Pada lingkungan pemerintahan teori ini menggambarkan pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai pemilik modal. Pemerintah sebagai agen memiliki kewajiban untuk lebih terbuka dalam mengelola sumber daya yang berasal dari masyarakat, dalam hal ini pemerintah harus menjunjung prinsip akuntabilitas melihat banyaknya sumber daya yang harus dikelola.

4. Teori Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang berkualitas tinggi adalah sumber daya manusia yang mampu menciptakan nilai komparatif tetapi juga nilai kompetitif, generatif, dan inovatif dengan memanfaatkan pengetahuan, kreativitas, dan imajinasi, tidak lagi menggunakan energi kasar semata (Ndahar, 1999).

Sumber daya manusia harus diartikan sebagai sumber dari kekuatan yang terdapat dalam diri manusia, dimana hal tersebut dapat

didayagunakan oleh organisasi. Hal ini dimaksudkan bahwa manusia memiliki daya yang dapat dimanfaatkan menjadi kekuatan yang akan memengaruhi kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan. Sumber daya manusia juga harus ditingkatkan kualitas dan kompetensinya sehingga hal tersebut menjadi sebuah kekuatan.

5. Teori Komitmen Organisasi dan Partisipasi Masyarakat

Komitmen organisasi merupakan salah satu tingkah laku dalam organisasi yang menjadi hal penting dikarenakan organisasi membutuhkan aparatur yang memiliki komitmen organisasi, aparatur atau individu yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan lebih stabil dan produktif dalam suatu kegiatan yang akan menguntungkan bagi organisasi (Greenberg dan Baron, 1993). Mowday *et al.*, (1982) menyatakan individu yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan lebih termotivasi dalam mencapai tujuan organisasi. Komitmen organisasi bertolak belakang dengan tingkat absensi dan tingkat *turnover* serta kelambanan dalam bekerja (Angel dan Perry, 1981).

Teori partisipasi yang diungkapkan Handayani (2006) bahwa partisipasi merupakan alat agar masyarakat terlibat secara aktif dalam proses kegiatan dan juga dengan mengikut sertakan masyarakat dalam proses kegiatan akan menumbuhkan rasa memiliki dan tanggungjawab terhadap organisasi. Teori ini juga menekankan bahwa masyarakat harus secara langsung ikut dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan

proses pemerintahan guna terwujudnya pembangunan yang merata dan sesuai.

6. Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa

Kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki individu dalam melakukan berbagai macam kegiatan dalam sebuah pekerjaan yang dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor intelektual dan kemampuan fisik (Robbins, 2007). Menurut McClelland (1973), kompetensi merupakan karakteristik yang mendasar dari seorang individu yang secara langsung berpengaruh terhadap kinerja yang dihasilkan.

Kompetensi meliputi gabungan antara pengetahuan, kemampuan dan keahlian yang sangat diperlukan dalam melakukan suatu pekerjaan (Rudana, 2005). Kompetensi ini merupakan hal yang penting yang harus dimiliki oleh seorang aparatur dalam mengelola dana desa, melihat banyaknya jumlah sumber daya yang akan dikelola. Seorang aparatur harus memiliki pengetahuan, kemampuan serta sikap yang baik dalam mengelola dana desa (Mada *et al.*, 2017).

7. Komitmen Organisasi Pemerintah Desa

Komitmen organisasi menurut Gibson (1997), merupakan keterlibatan rasa dan loyalitas yang ditunjukkan oleh individu dalam melakukan kegiatan dalam suatu organisasinya atau unit organisasi. Konsep komitmen organisasi terdiri dari kepercayaan, menerima nilai organisasi, rela berusaha mencapai tujuan organisasi dan memiliki keinginan yang tinggi untuk tetap berada dalam organisasi.

Mitchel dalam (Suwardi & Utomo, 2011) mengemukakan bahwa komitmen organisasi adalah orientasi individu terhadap kerja yang menunjukkan bahwa individu selalu memikirkan pekerjaan, dimana pekerjaan ini memberikan kepuasan hidup dan status bagi kehidupan. Komitmen organisasi ini menggambarkan bahwa individu bekerja sesuai dengan tujuan organisasi yang dikarenakan individu tersebut merasa bahwa ia juga bagian dari organisasi.

8. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi merupakan keterlibatan seorang individu secara sadar dalam kegiatan tertentu dan kondisi tertentu, yang terjadi antara individu dengan individu yang lain ataupun individu dengan kelompok melalui berbagai cara dan berbagi segala macam informasi (Ach. Wazir Ws., *et al.*, 1999) lemahnya partisipasi akan berdampak pada pengelolaan dana desa (Anwar dan Jatmiko, 2012).

Partisipasi dapat juga dikatakan sebagai interaksi yang dialami individu dengan individu yang lain. Partisipasi masyarakat dibagi kedalam 6 (enam) pengertian (Mikkelsen, 1999):

- a. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan;
- b. Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan;

- c. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri;
- d. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu;
- e. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial;
- f. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

Partisipasi sangat erat hubungannya dengan masyarakat, dimana didalam masyarakat sendiri secara umum telah terjadi interaksi antara individu yang membentuk sebuah sistem. Partisipasi masyarakat merupakan interaksi yang terjadi didalam suatu kelompok yang membentuk sebuah sistem yang didalamnya membahas segala hal yang menyangkut kelangsungan hidup masyarakat.

9. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi merupakan kumpulan dari beberapa unsur teknologi seperti komputer, perangkat (*hardware dan software*), *database*, jaringan, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson dalam Sugiarti & Yudianto, 2017). Pemanfaatan teknologi

informasi merupakan keadaan atau sikap seorang akuntan untuk menggunakan teknologi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya, dalam pemanfaatan teknologi informasi mencakup (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri ini (Trisaputra, 2013).

Pemanfaatan teknologi menjadi hal yang penting dalam mempermudah pekerjaan untuk mengelola data menjadi sebuah informasi untuk keperluan para pemegang kepentingan untuk mengambil tindakan atau keputusan dalam memberikan pelayanan yang baik kepada publik.

10. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Pengelolaan dana desa sangat erat dengan akuntabilitas, aparatur yang mengelola dana desa harus mengerti mengenai akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan kewajiban yang dimiliki oleh individu yang diamanati mengelola sumber daya dengan cara mempertanggungjawabkan dan menerangkan kinerja individu, badan hukum, maupun pemimpin kepada yang memiliki hak untuk menerima pertanggungjawaban dan keterangan (Fajri *et al.*, 2012).

Akuntabilitas memiliki fungsi yang sangat penting yaitu untuk mencegah penyalahgunaan fasilitas, sarana, dan anggaran publik yang dikelola oleh institusi (Setiyono, 2014). Terdapat 5 (lima) dimensi yang terdapat dalam akuntabilitas diantaranya: 1) dimensi transparansi, dimensi

ini menekankan pada pengungkapan kinerja institusi kepada publik. 2) dimensi pertanggungjawaban, institusi atau organisasi lebih sadar akan konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. 3) dimensi pengendalian, hal ini menjadi kendali dari kegiatan yang dilakukan institusi sesuai dengan harapan yang berkepentingan. 4) dimensi tanggungjawab, pada dimensi ini organisasi dituntut untuk mematuhi hukum dan aturan yang berlaku. 5) dimensi responsiveness, dimana organisasi harus memenuhi harapan substantif yang disampaikan dalam bentuk permintaan/kebutuhan (Koppel, 2005).

B. Penurunan Hipotesis dan Penelitian Terdahulu

1. Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki oleh individu dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan dan masing-masing individu memiliki kemampuan yang berbeda-beda dilihat dari berbagai aspek. Aspek atau faktor yang akan memengaruhi kompetensi dari aparatur dapat berupa pengetahuan, kemampuan (*skill*) baik *softskill* maupun *hardskill*, dan sikap atau perilaku yang dimiliki individu (Edison *et al.*, 2016).

Aparatur pengelola dana desa secara otomatis memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban dari segala kegiatan yang dilakukannya dalam mengelola dana desa. Pertanggungjawaban yang dilakukan diistilahkan dengan akuntabilitas,

dimana akuntabilitas ini merupakan suatu kewajiban bagi individu yang mengelola sumber daya yang diberikan untuk memberikan pelayanan yang baik. Sumber daya yang dikelola oleh aparat sebagai pelayan harus bertanggungjawab dan diperjelas sumber daya tersebut dikelola seperti apa dan bagaimana sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Pertanggungjawaban yang diberikan kepada masyarakat sebagai tuan (*principal*) berhak untuk mengetahui informasi secara akuntabel dan transparan guna perbaikan pelayanan yang seharusnya untuk mewujudkan pelayanan organisasi yang baik.

Aparat yang kompeten akan menghasilkan *output* yang baik yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas, hal ini sejalan dengan teori sumber daya manusia yang mengemukakan bahwa sumber daya manusia merupakan daya yang harus ditingkatkan kualitas dan kompetensinya untuk menjadi sebuah kekuatan. Sejalan pula dengan teori *stewardship* dimana aparat yang bertugas sebagai pelayan memiliki kewajiban untuk melayani sebagai wujud akuntabilitas, sehingga pada saat pengambilan keputusan dalam penggunaan dana desa akan menghasilkan keputusan yang terbaik guna memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan tugas yang seharusnya seorang aparat (Mada, *et al.*,2017); (Sudiaranti, *et al.*, 2015); (Irma 2015), sehingga peneliti mengajukan hipotesis:

H₁ : Kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

2. Pengaruh Komitmen Organisasi Pemerintah Desa terhadap Efektivitas Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Organisasi memiliki tujuan utama yaitu melayani masyarakat dengan baik, dalam melakukan kegiatan pelayanan tersebut sebuah organisasi tidak akan dapat bergerak apabila tidak memiliki penggerak yaitu seorang aparatur yang ada didalamnya. Aparatur dan organisasi adalah dua unsur penting dalam memberikan pelayanan yang baik kepada publik, seorang aparatur memiliki hubungan yang erat dengan organisasi atau institusi. Aparatur sebagai makhluk sosial memiliki kepuasan tersendiri apabila melakukan suatu tindakan. Tindakan yang dilakukan tersebut berhubungan dengan komitmen yang dimiliki oleh aparatur dalam suatu tindakan. Keterlibatan rasa dan keterlibatan loyalitas terhadap suatu institusi atau organisasi menimbulkan komitmen terhadap organisasi tersebut, semakin tingginya loyalitas yang dimiliki oleh aparatur terhadap organisasinya akan semakin tinggi komitmennya terhadap organisasi tersebut (Gibson, 1997).

Organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu dengan mengelola sumber daya atau anggaran yang telah disediakan oleh para *principal* (masyarakat). Anggaran tersebut dikelola oleh aparatur sebagai agen berdasarkan keinginan atau harapan dari masyarakat, tujuan dari organisasi ialah melayani publik dengan sebaik mungkin. Aparatur yang memiliki komitmen organisasi yang baik akan menjunjung tinggi tujuan

organisasi dikarenakan aparatur merasa menjadi bagian dari organisasi (Mada *et al.*, 2017).

Pengelolaan anggaran dana desa yang dilakukan aparatur dengan tujuan melayani publik harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Pertanggungjawaban ini merupakan wujud dari akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Akuntabilitas pengelolaan dana desa akan terwujud dengan komitmen organisasi pemerintah desa yang baik, hal ini dikarenakan aparatur yang terdapat didalam organisasi atau institusi memiliki rasa keterlibatan dan kepuasan hidup dalam bekerja untuk mencapai tujuan organisasi, penyelarasan tujuan organisasi dan aparatur dapat terwujud dengan komitmen organisasi yang tinggi. Kewajiban sebuah organisasi atau institusi ialah memberikan pertanggungjawaban dari segala aktivitas dalam mengelola anggaran yang secara langsung pertanggungjawaban tersebut dilakukan oleh aparatur sebagai penggerak organisasi.

Aparatur yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang dilakukannya dalam organisasi untuk mewujudkan pelayanan kepada publik agar menjadi lebih baik, hal ini sejalan dengan teori *stewardship* dimana aparatur pengelola dana desa harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sejalan pula dengan teori komitmen organisasi yang menjabarkan bahwa semakin tinggi komitmen organisasi individu akan

memengaruhi tingkat kecepatan kerja yang dimilikinya. Dengan kecepatan dan ketepatan bekerja akan memengaruhi laporan pertanggungjawaban yang diberikan kepada masyarakat sebagai prinsipal (Mowday *et al.*, 1982); (Ferina, 2016); (Mada *et al.*, 2017); (Fajri *et al.*, 2012). Oleh karena itu, peneliti mengajukan hipotesis:

H₂ : Komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

3. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan anggaran dana desa dilakukan oleh aparatur dalam hal mewujudkan harapan dan permintaan masyarakat agar terwujud pelayanan publik yang baik. Aparatur sebagai pengelola dana desa bekerja sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku, mulai dari penggunaan dana desa, dan pencatatan penggunaan dana desa. Pengelolaan ini harus didukung oleh masyarakat dengan cara berpartisipasi terhadap pengelolaan dana desa.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa dapat berupa keikutsertaan masyarakat dalam membangun desa. Partisipasi ini dapat juga berupa pengawasan dari kegiatan yang dilakukan pemerintah atau institusi dalam mengelola atau menggunakan anggaran sesuai dengan kepentingan masyarakat. Masyarakat sebagai prinsipal secara otomatis harus memantau dan menilai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah (Riyanto, 2015).

Terdapat dimensi *responsiveness* atau responsif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Responsif ini dimaksudkan untuk memperoleh tanggapan dari masyarakat untuk menilai kegiatan maupun kinerja dari pemerintah dalam hal kesesuaian dengan harapan atau permintaan masyarakat (Setiyono, 2014). Dimensi responsif ini sangat berhubungan dengan keterlibatan masyarakat dimana masyarakat harus memberikan tanggapan atau masukan dalam hal meningkatkan pembangunan dan pengambilan keputusan untuk kedepannya.

Akuntabilitas menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk kesejahteraan dan keberlangsungan pembangunan. Keputusan yang akan diambil oleh aparatur pemerintah haruslah melibatkan masyarakat, hal ini sejalan dengan teori partisipasi yang menjelaskan bahwa masyarakat harus terlibat secara langsung dalam proses pemerintahan dan pengambilan keputusan (Handayani, 2006), dari teori tersebut dapat diartikan bahwa masyarakat dapat memberikan tanggapan kepada keputusan pemerintah agar dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa tidak terjadi penyalahgunaan atau penyelewengan, dan juga agar pemerintah lebih terbuka dalam mempertanggungjawabkan segala kegiatannya (Mada, *et al.*, 2017); (Karimah, 2014); (Arifiyanto dan Kurrohman, 2017). Oleh karena itu, peneliti mengajukan hipotesis:

H₃ : Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

4. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Martin (1999) memaparkan bahwa teknologi informasi tidak hanya terfokus kepada penggunaan komputer (perangkat keras dan perangkat lunak) yang memiliki fungsi untuk menyimpan dan mengelola data yang didapatkan, melainkan juga mencakup komunikasi dalam hal menyampaikan informasi. Teknologi informasi merupakan sekumpulan perangkat yang dapat digunakan untuk mengolah data dan menyampaikan informasi kepada masyarakat dan juga dapat mempermudah pekerjaan para aparatur dalam mengelola dana desa.

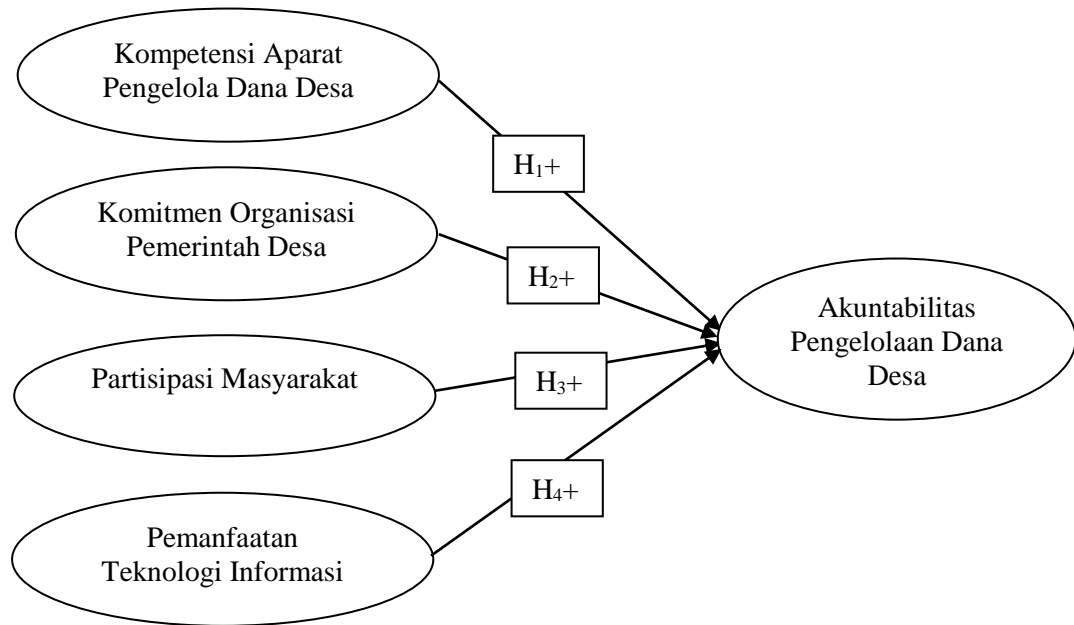
Pemanfaatan teknologi informasi bertujuan untuk mengelola data menjadi sebuah informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan, dan teknologi informasi menjadi alat untuk mempermudah kemudahan pekerjaan yang dilakukan oleh aparat (Trisaputra, 2013). Teknologi informasi terus berkembang dengan pesat sehingga penyampaian informasi menjadi sangat cepat dan terperinci. Organisasi atau institusi memiliki kegiatan untuk mengelola sumber daya yang diberikan, pengelolaan dana desa sebagai wujud pelaksanaan amanat guna memenuhi keinginan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Pengelolaan dana yang dilakukan oleh pemerintah harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip akuntabilitas .

Teknologi informasi sangat membantu dalam pengelolaan dana desa, penggunaan teknologi informasi dalam mengelola data menjadi

sebuah informasi akan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam mengolah data, dikarenakan dengan teknologi informasi data yang diolah akan lebih terperinci dan tepat. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dana desa akan mempermudah aparaturnya dalam mengolah dan mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat, hal ini sejalan dengan teori *stewardship* dimana dengan memanfaatkan teknologi informasi secara langsung aparaturnya lebih terbantu dalam hal pengelolaan dana desa, sehingga aparaturnya akan dengan mudah menjalankan kewajibannya sebagai pemberi pelayanan sebagai wujud akuntabilitas kepada masyarakat. (Andriani, 2012); (W. Komalasari, 2017); (Yadnya, et al., 2017), sehingga peneliti merumuskan hipotesis keempat:

H₄ : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

C. Model Penelitian



Gambar 2.1
Model Penelitian